**PELAKSANAAN PASAL 3 AYAT (4) HURUF b PERATURAN MENTERI
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM
(STUDI DI DEPOT AIR MINUM 56 PANOONGAN CIAMIS)**

Aisha Ramadhan^{*})

aisha_ramadhan@student.unigal.ac.id

Ukilah Supriyatin^{*})

ukilah.supriyatin@gmail.com

Hendra Sukarman^{*})

hen.soek@gmail.com

ABSTRACT

Water is the most important substance in life after air. In drinking water processing, not just anyone can be an employee. Because drinking water is a medium that can transmit disease. So, drinking water processing employees must be in a truly healthy and clean condition when carrying out water treatment. However, in reality, drinking water depots do not carry out their duties as handlers. This is contrary to Article 3 paragraph (4) letter b Minister of Health Regulation Number 43 of 2014 concerning Hygiene Sanitation of Drinking Water Depots. The problem studied in this thesis is regarding the implementation of Article 3 paragraph (4) letter b of Minister of Health Regulation Number 43 of 2014 concerning Hygiene Sanitation of Drinking Water Depots at Drinking Water Depot 56 Panoongan Ciamis, obstacles in its implementation, and efforts to deal with it. this problem. The research method used is descriptive analytical, namely a study approach which aims to provide an overview, explanation and clarity of the problem as well as reformulating the problem based on data obtained during the study which is then analyzed in order to obtain a systematic and objective structure of thought and understanding. Empirical juridical research is called field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society through interviews. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the implementation of Article 3 paragraph (4) letter b of Minister of Health Regulation Number 43 of 2014 concerning Hygiene Sanitation of Drinking Water Depots at the 56 Panoongan Ciamis Drinking Water Depot has not been implemented optimally, namely the attitude of the handlers in filling water into in gallons, handlers often do not behave hygienically and cleanly when working, for example while smoking, forgetting not to wash their hands when serving customers, not dressing neatly and cleanly, due to a lack of awareness on the part of the drinking water depot and being indifferent to the production procedures that should be carried out, lack of Human Resources (HR) who work at drinking water depots. After understanding the conclusions above,

^{*} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

suggestions are given, among others, it is hoped that business actors will better understand that the provisions regarding Hygiene Sanitation at Drinking Water Depots must be fully implemented because this is a fulfillment of the right to health. It is hoped that the 56 Panoongan Ciamis drinking water depot will supervise and evaluating every process that takes place at the 56 Panoongan Drinking Water Depot, starting from the production process to the drinking water distribution process, it is hoped that the drinking water depot will always improve the professionalism of its employees/handlers.

Keywords: *Hygiene, Sanitation, Drinking Water*

ABSTRAK

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Dalam pengolahan air minum, tidak sembarang orang yang bisa dijadikan karyawan. Karena air minum merupakan salah satu media yang dapat menjadi penularan penyakit. Maka karyawan pengolah air minum harus benar-benar dalam kondisi sehat dan bersih dalam melakukan pengolahan air. Akan tetapi pada kenyataannya pihak depot air minum tidak melaksanakan kewajiban penjamah tersebut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Depot Air Minum 56 Panoongan Ciamis, kendala-kendala dalam pelaksanaannya, dan upaya-upaya dalam menangani permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu pendekatan studi yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, dan kejelasan permasalahan serta merumuskan kembali permasalahan tersebut berdasarkan data yang diperoleh selama studi untuk kemudian dianalisis guna memperoleh susunan pemikiran dan pemahaman yang sistematis dan objektif, metode pendekatan yuridis empiris disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Depot Air Minum 56 Panoongan Ciamis belum dilaksanakan secara maksimal, yaitu sikap penjamah dalam melakukan pengisian air ke dalam galon sering kali penjamah saat bekerja tidak berperilaku higienis dan bersih, misalnya sambil merokok, lupa tidak mencuci tangan saat melayani konsumen, tidak berpakaian rapih dan bersih, dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak depot air minum dan bersikap acuh terhadap prosedur produksi yang seharusnya dilakukan, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di depot air minum. Setelah memahami kesimpulan diatas, maka terdapat saran yang diberikan antara lain diharapkan pelaku usaha lebih memahami bahwa ketentuan mengenai Higiene Sanitasi Depot Air Minum ini memang harus dilaksanakan sepenuhnya karena hal tersebut merupakan pemenuhan terhadap hak sehat, diharapkan pihak depot air minum 56 Panoongan Ciamis agar mengawasi dan mengevaluasi setiap proses yang berlangsung di Depot Air Minum 56 Panoongan mulai dari proses produksi hingga proses distribusi air minum, diharapkan depot air minum selalu meningkatkan kualitas profesionalitas pegawai/penjamah.

Kata Kunci: Higiene, Sanitasi, Air Minum

I. Pendahuluan

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Tiga per empat bagian tubuh manusia terdiri dari air. Manusia tidak

dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Air juga merupakan zat yang paling parah akibat pencemaran. Penyakit-penyakit yang menyerang manusia dapat ditularkan dan disebabkan melalui air. Penyakit-penyakit tersebut merupakan akibat semakin tingginya kadar pencemar yang memasuki air.¹⁾ Air minum menjadi sumber utama agar tubuh mendapatkan asupan cairan yang cukup, karena 60% dari tubuh manusia terdiri atas cairan. Kurangnya cairan dalam tubuh menyebabkan gagalnya seluruh fungsi organ yang ada dalam tubuh. Hal itu terjadi karena darah terlalu kental sehingga asupan nutrisi ke seluruh tubuh terganggu termasuk ke bagian jantung maupun otak kita.²⁾

Air menjadi kebutuhan dasar tiap umat manusia, baik pada masa ini maupun masa lampau. Bahkan, tidak hanya manusia yang memerlukan air untuk dikonsumsi, hewan dan tumbuhan pun juga memerlukan air untuk hidup. Air untuk dikonsumsi merupakan air minum sedangkan air untuk hidup bisa dikatakan sebagai air bersih. Pengertian dari air minum menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum “Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum”.

Pengertian air bersih tercantum dalam Pasal 1 huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air “Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak”.

Air minum yang dikonsumsi oleh manusia, dapat diolah dengan berbagai macam cara. Ada yang mengonsumsi air dengan memasaknya terlebih dahulu. Ada yang lebih memilih untuk membeli air minum dalam

¹⁾Rido Wandrivel, Netty Suharti, dan Yuniar Lestari. (2012). *Kualitas Air Minum Yang Diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Bungus Padang Berdasarkan Persyaratan Mikrobiologi*. Jurnal Kesehatan Andalas. 1 (3),129.Diakses 20 November 2022. Doi : <https://doi.org/10.25077/jka.v1i3.84>

²⁾Eko Sutriyanto. 2022. *Dehidrasi Bisa Sebabkan Kematian*. <http://www.tribunnews.com/kesehatan/2010/07/11/dehidrasi-bisa-sebabkan-kematian>. Diakses 19 November 2022

kemasan yang sudah memiliki Standar Nasional Indonesia agar lebih aman, adapula yang membeli air produksi di Depot Air Minum (DAM).

Seiring dengan meningkatnya status sosial dan ekonomi masyarakat, maka kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan air minum juga semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan daya dukung alam untuk menyediakan air bersih untuk masyarakat juga sudah mulai berkurang. Hal ini disebabkan lingkungan tanah, dan air permukaan sudah banyak yang mengalami pencemaran, sudah tidak aman lagi untuk menggunakan air tanah dan sungai sebagai sumber air bersih dan air minum.³⁾

Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih dan air minum bagi masyarakat, maka air minum isi ulang merupakan pilihan utama, karena harganya yang tidak begitu mahal dan terjangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Depot Air Minum (DAM) adalah “Usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen”.

Depot air minum isi ulang merupakan salah satu kegiatan usaha yang mengarah kepada air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dan juga memenuhi gaya hidup masyarakat sekarang yang mengutamakan kepraktisan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang dulu terbiasa hidup dengan menggunakan tenaga sendiri sekarang terbiasa hidup dengan teknologi dan serba praktis. Jika dulu masyarakat terbiasa minum dengan air yang dimasak sendiri, sekarang masyarakat lebih cenderung mengkonsumsi air minum yang tidak perlu dimasak dan dapat diminum langsung.⁴⁾

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa “ Kesehatan adalah keadaan sehat, baik

³⁾Evino Sugriarta, dan Lindawati. (2018). *Hygiene Sanitasi Depot Air Minum*. Jurnal Sehat Mandiri.13(1),51. Diakses 19 November 2022. Doi : <https://doi.org/10.33761/jsm.v13i1.57>

secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Kesehatan menjadi hak asasi manusia, hal ini tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kesehatan merupakan dasar dari standar kemanusiaan seseorang, karena tanpa kesehatan seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak hidupnya yang lain. Ketentuan perundangan-undangan di atas menjadi dasar bahwa hak atas kesehatan bukan lagi hanya sekedar hak pribadi manusia, akan tetapi menjadi hak hukum dimana negara juga ikut bertanggung jawab untuk mewujudkannya.

Kebutuhan konsumen akan pemenuhan air minum yang semakin meningkat, mendasari perlu dijaminnya kebersihan dari air minum yang hendak dikonsumsi tersebut, kebersihan inilah yang sering disebut dengan higiene. Higiene Sanitasi dalam pengolahan air minum mempunyai tiga aspek persyaratan menurut Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014. Aspek tersebut terdiri dari aspek tempat, aspek peralatan, dan aspek penjamah. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar Depot Air Minum dalam memproduksi air minum yang dapat dikonsumsi oleh para konsumen dan menjamin kesehatan konsumen.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Upaya menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dimaksudkan agar segala kegiatan mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat berjalan dengan secara khusus melindungi keamanan dan kenyamanan

⁴Khayan Asmadi dan H.S Kasjono. 2016. *Pengolahan Air Minum*. Yogyakarta : Gosyen

konsumen dari tindakan kesewang-kewangan pelaku usaha.

Permasalahan yang disoroti dalam penelitian ini yaitu mengenai aspek penjamah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Higiene Sanitasi dalam pengolahan air minum mempunyai tiga aspek persyaratan menurut Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014. Aspek tersebut terdiri dari aspek tempat, aspek peralatan, dan aspek penjamah. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar Depot Air Minum dalam memproduksi air minum yang dapat dikonsumsi oleh para konsumen dan menjamin kesehatan konsumen. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Permasalahan yang disoroti dalam penelitian ini yaitu mengenai aspek penjamah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Dalam aturan Pasal 1 angka 5, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengelolaan Air Minum pada DAM untuk melayani konsumen.

Dalam pengolahan air minum, tidak sembarang orang yang bisa dijadikan karyawan. Karena air minum merupakan salah satu media yang dapat menjadi penularan penyakit. Sehingga air minum hasil olahan harus benar-benar terjamin untuk dikonsumsi. Maka karyawan pengolah air minum harus benar-benar dalam kondisi sehat dan bersih dalam melakukan pengolahan air.

Berbagai hal yang seharusnya menjadi syarat mutlak dipenuhi oleh seorang karyawan, sesuai dengan aspek yang peneliti amati, diantaranya

kondisi badan yang sehat secara fisik. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan yang maksimal dengan fisik yang sehat dan kuat. Bebas dari luka, penyakit kulit, flu dan batuk, yang dapat mengakibatkan pencemaran terhadap air minum berupa penyebaran virus dan bakteri. Harus menggunakan pakaian bersih dan sepatu, jika pakaian tidak bersih bisa saja kotoran pada pakaian mencemari air olahan, mesin, dan peralatan lainnya, kemudian penggunaan sepatu agar dapat memberikan kesehatan berupa pencegahan terhadap kutuair pada kaki dan keselamatan kerja bagi karyawan. Selain itu juga dilihat perilaku penjamah seperti mencuci tangan, tidak meludah sembarangan, tidak merokok karena asap rokok dengan mudah dapat terkontaminasi dengan air yang mengalir dengan bau asap rokok yang tajam dan debu dari pembakaran rokok dengan mudah terbawa oleh angin. Seharusnya semua karyawan DAM memiliki higiene yang bersih dan perilaku yang sehat agar menghasilkan olahan air minum yang bersih dan sehat pula bagi konsumen.

Dengan demikian penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengelolaan Air Minum pada DAM untuk melayani konsumen merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi higiene dan sanitasi air minum isi ulang di Depot Air Minum 56 Lingkungan Panoongan, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hal di atas bahwa di Depot Air Minum 56 Panoongan Ciamis ditemukan permasalahan seperti halnya penjamah atau orang yang secara langsung melayani konsumen, dalam melakukan pengisian air ke dalam galon sering kali penjamah saat bekerja tidak berperilaku higienis dan bersih, misalnya sambil merokok, lupa tidak mencuci tangan saat melayani konsumen, tidak berpakaian rapih dan bersih. Seharusnya penjamah pada saat bekerja dalam pengolahan air minum dan melayani konsumen harus berperilaku higienis dan saniter setiap melayani konsumen, antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setiap melayani konsumen, menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, dan tidak merokok setiap melayani konsumen.

Akan tetapi pada kenyataannya pihak depot air minum tidak melaksanakan kewajiban penjamah tersebut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum yang menyatakan: “berperilaku higienis dan saniter setiap melayani konsumen, antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setiap melayani konsumen, menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, dan tidak merokok setiap melayani konsumen”. Sehingga dalam hal ini kehygienisannya diragukan dan konsumen bisa saja mengalami kerugian dari perilaku depot yang kurang bertanggung jawab.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.⁵⁾

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁶⁾ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.⁷⁾

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁸⁾ Deskriptif analitis merupakan metode yang

⁵⁾Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.105

⁶⁾*Ibid.*

⁷⁾Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 9

⁸⁾*Ibid.* hlm.105

dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁾ Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder.¹⁰⁾ Sumber data di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹⁾ yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitas Depot Air Minum;

a. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer¹²⁾ yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku;
- 2) Jurnal;
- 3) Majalah;
- 4) Artikel;
- 5) dan berbagai tulisan lainnya.

b. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³⁾

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan bahan hukum dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan

⁹⁾*Ibid.* hlm.223

¹⁰⁾Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 23-24

¹¹⁾*Ibid.* hal.13

¹²⁾*Ibid.*

¹³⁾*Ibid.*

perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁴⁾

Analisis data yang akan dilakukan secara kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. Peraturan perundang-undangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir dalam menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif,¹⁵⁾ pada akhirnya dapat menjawab permasalahan penelitian ini. Lokasi penelitian yaitu di Perpustakaan Universitas Galuh yang beralamat di Jalan R.E. Martadiata Nomor 150 Telp. (0265) 771048 Ciamis dan Depot Air Minum 56 Lingkungan Panoongan, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.

III. Hasil dan Pembahasan

Mengenai definisi hukum menurut pendapat M.H. Tirtaatmidjaja, dalam buku Kansil menjelaskan bahwa hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah dan tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya didenda dan sebagainya.¹⁶⁾ Perlindungan konsumen menurut Shidarta menyatakan bahwa “Istilah perlindungan konsumen seringkali dipakai untuk menggambarkan perlindungan dalam bidang hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upaya untuk

¹⁴⁾Ronny Hanitijo Soemitro. *Op. Cit.*, hlm. 225

¹⁵⁾Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media. hlm. 393

¹⁶⁾C.S.T. Kansil. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta :Balai Pustaka. hlm.38.

menjamin terpenuhinya kebutuhan terhadap hal-hal yang merugikan pihak konsumen tersebut”.¹⁷⁾

Sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa “hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang sangat luas, dimana selain meliputi perlindungan konsumen barang dan jasa, terdapat pula perlindungan sebagai akibat dari timbulnya pemakaian barang dan/atau jasa dikemudian hari, misalkan seperti pemakaian barang yang dapat berakibat buruk pada kesehatan konsumen.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

¹⁷⁾Shidarta.2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Grasindo.hlm.58

Menurut Wisnlow dalam buku Soekidjo Notoatmodjo¹⁸⁾ secara implisit mengatakan bahwa kegiatan kesehatan masyarakat itu mencakup Sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit, pendidikan kesehatan (higiene), manajemen (pengorganisasian) pelayanan kesehatan, dan pengembangan rekayasa sosial dalam rangka pemeliharaan kesehatan masyarakat. Dari 5 bidang kegiatan kesehatan masyarakat tersebut, 2 kegiatan di antaranya yakni kegiatan pendidikan higiene dan rekayasa sosial adalah menyangkut kegiatan pendidikan kesehatan. Sedangkan kegiatan bidang sanitasi, pemberantasan penyakit, dan pelayanan kesehatan sesungguhnya tidak sekedar penyediaan sarana fisik tetapi perlu upaya pemberian pengertian dan kesadaran kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya upaya-upaya atau fasilitas fisik tersebut dalam rangka pemeliharaan, peningkatan, dan pemulihan kesehatan mereka. Apabila tidak disertai dengan upaya-upaya ini maka sarana-sarana atau fasilitas pelayanan tersebut tidak atau kurang berhasil dan optimal.

Higiene Sanitasi menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM) yaitu : “Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan, dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi”.

Pengertian dari air minum menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum “Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum”.

Sedangkan yang dimaksud dengan DAM menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Depot Air Minum (DAM) adalah

¹⁸⁾Soekidjo Notoatmodjo. 2011. *Hukum Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni*. Jakarta : Remika Cipta.hlm.16

“Usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen”.

Higiene Sanitasi dalam pengolahan air minum mempunyai tiga aspek persyaratanyang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (4). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014. Aspek tersebut terdiri dari aspek tempat, aspek peralatan, dan aspek penjamah.

Selanjutnya aspek penjamah sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum,” Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengelolaan Air Minum pada DAM untuk melayani konsumen”.

Mengenai aspek penjamah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, yaitu berbunyi : “berperilaku higienis dan saniter setiap melayani konsumen, antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setiap melayani konsumen, menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, dan tidak merokok setiap melayani konsumen”. Seharunya penjamah pada saat bekerja dalam pengolahan air minum harus berperilaku higienis dan saniter setiap melayani konsumen. Hal ini perlu dilakukan sebagai suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan konsumen.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, Rio Christiawan dalam bukunya menjelaskan bahwa¹⁹⁾ perlindungan konsumen di Indonesia berpedoman pada asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas kemanan, dan keselamatan konsumen serta asas kepastian hukum. Hal tersebut menegaskan bahwa konsep

¹⁹⁾Rio Christiawan.2021. *Hukum Bisnis Kontemporer*. Depok : Rajawali Pers.hlm.122

perlindungan terhadap konsumen menerapkan nilai-nilai dasar hukum secara berimbang. Penerapan nilai-nilai dasar hukum tersebut tergambar pada diterapkannya asas manfaat, asas keadilan, dan asas kepastian hukum sebagai asas yang digunakan dalam konsepsi perlindungan hukum”.

Depot Air Minum 56 Panoongan Ciamis merupakan salah satu usaha mikro kecil dan menengah yang berjalan di bidang perdagangan berupa depot air minum isi ulang yang sudah berdiri kurang lebih 5 tahun lamanya, di dirikan oleh Bapak Opik Taopiq Hidayat (Pelaku Usaha) yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lingkungan Panoongan RT 02/RW 14, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Depot Air Minum 56 Panoongan beroperasi mulai pukul 09.00 WIB yang mempunyai 1 orang pegawai yang diberikan tugas untuk mengurus depot air minum tersebut mulai dari proses produksi, melayani konsumen secara langsung sampai dengan pengantaran air minum isi ulang ke pembeli.

Alasan utama pelaku usaha mendirikan usaha depot air minum isi ulang ini karena usaha yang prospektif baik kedepannya, kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang menjadikan usaha depot air minum ini menjadi suatu kepraktisan bagi masyarakat, serta memiliki keuntungan.

Berdasarkan hasil penelitian di Depot Air Minum 56 Panoongan ditemukan permasalahan mengenai sikap penjamah yang sering lupa mencuci tangan pada saat melayani konsumen, merokok di area depot, lalu tidak mengenakan seragam khusus selama proses produksi dan pengisian galon air minum misalnya tidak menggunakan masker penutup mulut dan penutup kepala hanya menggunakan baju kaos seadanya. Mengingat juga sikap penjamah merupakan bentuk pelayanan konsumen dan hal penting untuk menjamin ke higienisan dari pada air tersebut agar aman dikonsumsi.

Adanya permasalahan, apabila merujuk pada Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, yang berbunyi: “berperilaku higienis dan saniter setiap melayani konsumen, antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setiap melayani konsumen, menggunakan pakaian

kerja yang bersih dan rapi, dan tidak merokok setiap melayani konsumen”. Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum terdapat juga beberapa persyaratan higiene sanitasi dalam pengelolaan air minum paling sedikit meliputi aspek:

- a. Tempat
- b. Peralatan
- c. Penjamah

Sehubungan hal tersebut, permasalahan yang terjadi di Depot Air Minum 56 Panoongan yaitu dalam hal aspek penjamah. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Aspek penjamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:

- a. Sehat dan bebas dari penyakit menular serta tidak menjadi pembawa kuman patogen (*carrier*), dan
- b. Berperilaku higienis dan saniter setiap melayani konsumen, antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setiap melayani konsumen, menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, dan tidak merokok setiap melayani konsumen.

Terjadi dampak di peralatan produksi maupun di wadah galon konsumen yang kotor atau tidak higienis dikarenakan penjamah tersebut tidak mencuci tangan terlebih dahulu karena bisa saja penjamah sebelum memegang peralatan dan galon telah memegang sesuatu benda atau yang dapat menjadi tercemarnya air galon, serta tidak berpakaian khusus dan tidak menggunakan masker menyebabkan air itu tidak layak dan tidak higienes untuk diminum. Melihat dari hal tersebut bahwa terdapat hak-hak konsumen yang dirugikan oleh pihak Depot Air Minum 56 Panoongan yang seharusnya menjadi kewajiban bagi setiap depot untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan menjaga dan memperhatikan ke higienisan dari pada air minum isi ulang itu agar tidak terjadinya dampak buruk terhadap kesehatan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Opik Taopiq Hidayat selaku pemilik usaha Depot Air Minum 56 Panoongan bahwa Pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Depot Air Minum 56 Panoongan Ciamis menghadapi beberapa kendala:

1. Ketidaktahuan adanya suatu peraturan yang mengatur tentang depot air minum, sehingga kita memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai kebiasaan tanpa melihat aturan yang ada khususnya yang mengatur tentang penjamah.
2. Agar lebih cepat juga dalam melayani konsumen jadi saat konsumen pesan air isi ulang galon kita langsung mengambil galon tersebut kemudian diisinya tanpa memperhatikan prosedur penjamah yang seharusnya.
3. Penjamah di Depot Air Minum 56 Panoongan belum dibekali dengan pelatihan kerja secara rutin.
4. Kurangnya kesabaran dari pihak konsumen yang membuat pihak pegawai seringkali tergesa-gesa dalam melakukan pengisian sehingga ada suatu proses yang sering kali terlewat.
5. Tidak bisa selalu mengawasi pegawai dalam melakukan isi ulang galon tersebut.

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Tika selaku pembeli (konsumen), menurutnya ada kendala-kendala yang terjadi diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran dari pihak depot air minum dan bersikap acuh terhadap prosedur produksi yang seharusnya dilakukan.
2. Kurangnya pengawasan dari pemilik depot air minum terhadap penjamah depot air minum.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di depot air minum sehingga menyebabkan lambat dalam pemesanan dan produksi.

Selain itu, adapun hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj.Sri Purnamayanti,SKM.,M.Si. dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dari

bidang kesehatan masyarakat yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani juga perihal yang berhubungan dengan depot air minum, menurut beliau yang menjadikan kendala bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dalam hal pengawasan ataupun dalam Pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai pemilik depot air minum diantaranya pemilik tidak mau memeriksakan sampel air ke laboratorium dengan alasan biaya mahal karena memang menurut peraturan seharusnya bahwa pemilik depot wajib memeriksakan sampel air secara mandiri.
2. Kuranya informasi dan edukasi tentang depot air minum ke masyarakat khususnya kepada pelaku usaha depot air minum.
3. Pihak depot air minum yang seringkali mementingkan masalah ekonomi agar produk terjual dengan cepat tanpa memerhatikan ke higienisan depot air minum itu sendiri dan kesehatan konsumen.

Agar dalam pelaksanaannya, Depot Air Minum 56 Panoongan Ciamis, khususnya dalam pelayanan konsumen dan terciptanya ke higienisan dan mutu air yang aman untuk dikonsumsi, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Opik Taopiq Hidayat selaku pemilik Depot Air Minum 56 Panoongan, telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala-kendala antara lain:

1. Lebih memahami lagi peraturan yang mengatur tentang depot air minum dan dijadikan acuan dalam proses produksi air minum isi ulang agar tetap terjaga ke higienisannya dan mementingkan kesehatan konsumen.
2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penjamah/pegawai depot.
3. Meningkatkan kualitas profesionalitas penjamah seperti, pelayanan konsumen dilakukan dengan baik memperhatikan prosedur dalam melakukan produksi tanpa keluar dari kaidah sopan santun kepada

konsumen, serta pihak-pihak terkait dalam pengawasan seperti Dinas Kesehatan, selalu mengawasi depot air minum dengan sering diadakannya pengecekan, pembinaan, pelatihan, dan bimbingan penyuluhan baik kepada pengusaha depot air minum ataupun kepada pegawai/penjamah terkait bagaimana pelaksanaan umum yang baik dan benar tanpa keluar dari peraturan yang berlaku.

Sementara hasil wawancara penulis dengan Hj.Sri Purnamayanti,SKM.,M.Si. dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dari bidang kesehatan masyarakat yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani juga perihal yang berhubungan dengan depot air minum, menurut beliau adapun upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pelaksanaannya diantaranya:

1. Mengadakan pelatihan higiene sanitasi depot air minum bagi pemilik depot air minum termasuk penjamah pangan atau operator depot air minum.
2. Melakukan Inpeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) memeriksa dan mengamati secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku di depot air minum.
3. Mengadakan peningkatan kapasitas petugas pengelola program kesehatan lingkungan atau tenaga sanitarian dalam penanganan keamanan pangan depot air minum.
4. Pelaksanaan pemeriksaan sampel air di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labsekda) Ciamis.

Higiene sanitasi pada pokoknya hal yang penting dalam proses produksi atau pengelolaan air minum agar terhindar dari adanya risiko penyakit bawaan air yang dapat membahayakan terhadap kesehatan konsumen. Hal ini menjadi penting dikarenakan pemanfaatan air sebagai air minum secara langsung berkaitan dengan tubuh manusia, sehingga perlu dijaga kualitasnya agar tidak membahayakan bagi tubuh manusia itu sendiri. Higiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya

kontaminasi yang berasal dari tempat, peralata, dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.

Bentuk pencegahan yang penting dalam upaya mengendalikan faktor risiko yang menimbulkan kerugian kepada konsumen salah satunya dimulai dari memperhatikan kebersihan dan ke higienisan penjamah, yaitu penjamah harus selalu memperhatikan dan menjalankan prosedur yang sesuai dengan peraturan sebelum melakukan produksi air galon isi ulang dan melayani konsumen secara benar.

Dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum disebutkan bahwa “Berperilaku higienis dan saniter setiap melayani konsumen, antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setiap melayani konsumen, menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, dan tidak merokok setiap melayani konsumen.”

Higiene sanitasi dalam pengelolaan air minum paling sedikit meliputi: tempat, peralatan, dan juga penjamah menjadi persyaratan yang dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha dan sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Depot Air Minum 56 Panoongan ditemukan permasalahan mengenai sikap penjamah yang sering lupa tidak mencuci tangan pada saat melayani konsumen, merokok di area depot, lalu tidak mengenakan seragam khusus selama proses produksi dan pengisian galon air minum misalnya tidak menggunakan masker penutup mulut dan penutup kepala hanya menggunakan baju kaos seadanya.

Tidak dilaksanakannya ketentuan pada Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum oleh pihak Depot Air Minum 56 Panoongan tersebut bukan berarti tidak mempunyai alasan, pelaku usaha menambahkan bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya kesabaran dari pihak konsumen yang membuat pihak pegawai seringkali tergesa-gesa dalam melakukan pengisian sehingga ada suatu proses yang sering kali

terlewat dan agar lebih cepat dalam melayani konsumen sehingga kurang memperhatikan prosedur penjamah yang seharusnya.

Meski begitu perbuatan itu tidak bisa dibenarkan karena sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengawasi penjamah dalam melakukan pelayanan kepada konsumen dan melakukan produksi air minum seperti berperilaku higienis dan saniter setiap melayani konsumen, antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setiap melayani konsumen, menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, dan tidak merokok setiap melayani konsumen, sebagai bentuk pencegahan dari adanya risiko penyakit bawaan air. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasanya tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tapi juga harus memperhatikan dengan baik kepentingan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, selain memiliki hak, pelaku usaha juga dituntut akan tanggung jawabnya. Dalam hal ini pihak Depot Air Minum 56 Panoongan atas tindakannya dengan tidak melaksanakan kewajiban kebersihan dan kehygienisan perilaku penjamah telah merugikan konsumen. Pelaku usaha seharusnya melaksanakan setiap kewajiban dan bertanggung jawab atas hasil produksinya baik berupa barang maupun jasa, dengan kata lain tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang memperoleh manfaat sedangkan pihak lain mendapat kerugian maka dari itu perlu adanya jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaa, pemakaian, pemanfaatan barang, dan/atau jasa yang dikonsumsi dalam hal ini berarti air minum, pihak depot harus menjamin bahwa air minum yang diproduksi tidak akan mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di

Depot Air Minum 56 Panoongan Ciamis, belum dilaksanakan secara maksimal mengenai sikap penjamah yang sering lupa tidak mencuci tangan pada saat melayani konsumen, merokok di area depot, lalu tidak mengenakan seragam khusus selama proses produksi dan pengisian galon air minum misalnya tidak menggunakan masker penutup mulut dan penutup kepala hanya menggunakan baju kaos seadanya. Mengingat juga sikap penjamah merupakan bentuk pelayanan konsumen dan hal penting untuk menjamin higienitas dari pada air tersebut agar aman dikonsumsi. Sehingga konsumen merasa dirugikan karena air yang dikonsumsi tidak higienis kurang memberikan keamanan terhadap kesehatan konsumen.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Depot Air Minum 56 Panoongan Ciamis, yaitu masih kurangnya kesadaran dari pihak depot air minum dan bersikap acuh terhadap prosedur produksi yang seharusnya dilakukan. Kurangnya pengawasan dari pemilik depot air minum terhadap penjamah depot air minum. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di depot air minum sehingga menyebabkan lambat dalam pemesanan dan produksi. Pihak depot air minum yang seringkali mementingkan masalah ekonomi agar produk terjual dengan cepat tanpa memperhatikan higienitas depot air minum itu sendiri dan kesehatan konsumen. Berhubungan dengan hal itu bahwa yang menjadi faktor utamanya yaitu karena pihak depot air minum masih kurang rasa kesadaran dan tanggung jawab dan pemahaman sebagai pemilik usaha depot, yang artinya menunjukkan bahwa pelaku usaha masih belum memahami arti dan tujuan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Depot Air Minum 56 Panoongan Ciamis, yaitu lebih memahami lagi peraturan yang mengatur tentang depot air minum dan dijadikan acuan dalam proses produksi air minum isi ulang agar tetap terjaga ke higienisannya dan lebih mementingkan kesehatan konsumen. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penjamah/pegawai depot. Meningkatkan kualitas profesionalitas penjamah seperti, pelayanan konsumen dilakukan dengan baik memperhatikan prosedur dalam melakukan produksi tanpa keluar dari kaidah sopan santun kepada konsumen, serta pihak-pihak terkait dalam pengawasan seperti Dinas Kesehatan, selalu mengawasi depot air minum dengan sering diadakannya pengecekan, pembinaan, pelatihan, dan bimbingan penyuluhan baik kepada pengusaha depot air minum ataupun kepada pegawai/penjamah terkait bagaimana pelaksanaan umum yang baik dan benar tanpa keluar dari peraturan yang berlaku. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis juga mengupayakan dengan mengadakan pelatihan higiene sanitasi depot air minum bagi pemilik depot air minum termasuk penjamah pangan atau operator depot air minum. Melakukan Inpeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) memeriksa dan mengamati secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku di depot air minum.

4.2. Saran-Saran

1. Diharapkan pelaku usaha lebih memahami bahwa ketentuan mengenai Higiene Sanitasi Depot Air Minum ini memang harus dilaksanakan sepenuhnya karena hal tersebut merupakan pemenuhan terhadap hak sehat yang menjadi hak setiap konsumen air minum di Depot Air Minum 56 Panoongan Ciamis, serta bersedia bertanggung jawab melaksanakan terhadap kewajiban sebagai pelaku usaha.

2. Dalam kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan, diharapkan pihak depot air minum 56 Panoongan Ciamis agar mengawasi dan mengevaluasi setiap proses yang berlangsung di Depot Air Minum 56 Panoongan mulai dari proses hingga proses distribusi air minum. Oleh sebab itu pengawasan dan kesadaran dari pihak depot air minum juga harus ditingkatkan dalam melaksanakan kewajibannya agar konsumen air minum terhindar dari hal-hal yang merugikan.
3. Diharapkan depot air minum selalu meningkatkan kualitas profesionalitas pegawai/penjamah, seperti melaksanakan kewajiban penjamah yaitu mencuci tangan pada saat melayani konsumen, mengenakan seragam khusus selama proses produksi dan pengisian galon air minum misalnya menggunakan masker penutup mulut dan penutup kepala sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Untuk Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis agar lebih pro aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Depot Air Minum

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers;
- Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media;
- Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka;
- Khayan Asmadi dan H.S Kasjono. 2016. *Pengolahan Air Minum*. Yogyakarta : Gosyen Publishing;
- Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya;
- Shidarta.2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Grasindo;

- Soekidjo Notoatmodjo. 2011. *Hukum Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni*. Jakarta : Remika Cipta;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;
- Rio Christiawan. 2021. *Hukum Bisnis Kontemporer*. Depok : Rajawali Pers;
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika;

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;

C. Sumber lain

- Eko Sutriyanto. 2022. *Dehidrasi Bisa Sebabkan Kematian*. <http://www.tribunnews.com/kesehatan/2010/07/11/dehidrasi-bisa-sebabkan-kematian>
- Evino Sugriarta, dan Lindawati. (2018). *Hygiene Sanitasi Depot Air Minum*. Jurnal Sehat Mandiri.13(1),51. Diakses 19 November 2022. Doi : <https://doi.org/10.33761/jsm.v13i1.57>
- Rido Wandrivel, Netty Suharti, dan Yuniar Lestari. (2012). *Kualitas Air Minum Yang Diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Bungus Padang Berdasarkan Persyaratan Mikrobiologi*. Jurnal Kesehatan Andalan. 1 (3),129. Diakses 20 November 2022. Doi : <https://doi.org/10.25077/jka.v1i3.84>